

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Wuku. 2011. *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Kab/Kota Pulau Jawa*. Universitas Widya Mataram Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2002 s/d 2016. *Kabupaten Solok Dalam Angka*. Solok : BPS Solok.
- _____. 2011 s/d 2015. *PDRB Kabuapten Solok Menurut Lapangan Usaha*. Solok : BPS Solok.
- Erfa, Ahzir. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Setelah Otonomi Khusus (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara)*. Universitas Sumatera Utara.
- Gujarati, Damodar N. 2009. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta : Erlangga.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah, Ardi. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabuapten Dan 9 Kota Di Provinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006)*. Universitas Trunojoyo.
- Kemalasari, Poppy dan Rafael Purto Sumaji, Sarwedi. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Probolinggo (Tahun Anggaran 2002 – 2014)*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Jakarta. Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.

- Matulesy, Febby Sonya. 2013. *Analisa Pengaruh Kinerja Keuangan (Rasio Efektifitas dan Rasio Kemandirian) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Manokwari*.
- Mizkan, Hendra dan Kamaliah, Restu Agusti. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Pekanbaru*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
- Rafniati. *Analisis Tingkat Kemandirian Dan Kinerja Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Belanja Modal Provinsi Jambi 2001 – 2012*. Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi.
- Ronald, Andreas dan Dwi Sarmiyati Ningsih. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo*. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*. Vol. I, No. I, Juni 2010. Fakultas Ekonomi universitas Janabadra.
- Sholikhah, Ratna. 2011. *Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000 – 2009*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Siallagan, Benny Tibestri. 2016. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung
- Suci, Stannia Cahaya. 2013. *Pengaruh Kemandirian Keunagan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Banten*. Institut Pertanian Bogor.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.

Sulistiyawan, Andri. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi daerah Di Kabupaten Boyolali APBD 2001 – 2010*. Fakultas Ekonomi Universitas muhammadiyah Surakarta.

Triani, Mike. 2015. *Analisis Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

www.djpk.depkeu.go.id, diakses pada 9 januari 2017. Pkl. 19.06 wib.

